



Pelaksanaan Sejumlah Program Terhambat

KONFLIK antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta terkait dengan lamanya proses pengesahan RAPBD bukan hanya membuat resah pegawai pemprov dan masyarakat.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut gelisah karena konflik membuat kementerian tersebut tidak bisa segera mengevaluasi RAPBD DKI Jakarta, yang berimbas pada terlambatnya pelaksanaan berbagai program.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek pun bersedia melaksanakan tugasnya menjadi wasit dalam konflik itu. Ia bahkan mengakui telah menerima surat dari DPRD yang menyatakan salinan RAPBD yang dikirim oleh Pemprov DKI bukan hasil pembahasan dengan wakil rakyat itu.

Menurutnya, surat itu menguatkan pihaknya untuk mengembalikan salinan RAPBD 2015 yang dikirimkan pemprov pada 5 Februari. Surat keberatan dari pimpinan DPRD atas dikirimkannya salinan RAPBD konsep awal (draf 1), dan bukan RAPBD hasil pembahasan dalam sidang komisi dan Badan Anggaran, menandakan adanya ketidakharmisan dalam pembahasan RAPBD.

Lebih lanjut Reydonnyzar mengatakan surat keberatan itu juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap RAPBD yang telah dikirim eksekutif sehingga Kemendagri tidak bisa mengevaluasi RAPBD tersebut. "Alasan pertama hanya karena struktur administrasi. Alasan lainnya, ketika saya melihat surat dari pimpinan DPRD tertanggal 10 Februari sekaligus menyatakan pengiriman RAPBD draf 1 menyalahi aturan. Menurut saya, antara DPRD dan eksekutif harus disinkronkan dahulu," kata Reydonnyzar dalam acara diskusi APBD 2015 DKI di lobi Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/2).

Ia mengungkapkan, ketika akan mengembalikan salinan draf RAPBD yang dinilai belum memenuhi syarat administratif, semula pihaknya hanya memberi catatan agar pemprov melengkapi struktur RAPBD. Namun ketika

menerima surat dari pimpinan DPRD dan mendengar rencana pengajuan hak angket, ia pun segera mengirim utusan ke DPRD guna membahas hal tersebut.

Menurut Reydonnyzar, pemprov dan DPRD hanya salah paham soal konsep *e-budgeting* serta pengiriman konsep RAPBD kepada Kemendagri. (Put/J-2)

1. PENDAPATAN DAERAH RP63,801 TRILIUN:

A. PAD Rp45,321 triliun:

- Pajak daerah : Rp38,379 triliun
- Retribusi daerah : Rp980 miliar
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah : Rp900 miliar
- Lain-lain pendapatan daerah : Rp7,071 triliun

B. Dana perimbangan Rp11,408 triliun:

- Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak 11,408 triliun (DAU dan DAK tidak ada)

C. Lain-lain pendapatan yang sah: Rp7,071 triliun

- Hibah : Rp4,556 triliun
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus : Rp2,514 triliun

Keterangan:

Dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya (tidak dijabarkan)

2. BELANJA DAERAH RP67,447 TRILIUN: (TIDAK DIJABARKAN)

3. SURPLUS/DEFISIT RP3,645 TRILIUN

Pembiayaan daerah

A. Penerimaan Rp9,282 triliun:

- Silpa : Rp8,983 triliun
- Penerimaan pinjaman daerah : Rp298,5 miliar

Keterangan:

Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang (tidak dijabarkan)

B. Pengeluaran Rp5,636 triliun:

- Penyertaan modal pemerintah (PMP) : Rp5,627 triliun
- Pembayaran pokok utang : Rp9 miliar

Keterangan:

Pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah (tidak dijabarkan)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah/Gr/Foto: MI/ANGGA YUNIAR